



- ❖ Kontekstualisasi (Pendidikan) Antropologi Indonesia
- ❖ Masalah dan Usaha Membangun Karakter Bangsa
- ❖ Relevansi Antara Kurikulum Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi dengan Kebutuhan Mengajar Bagi Guru Sosiologi dan Antropologi SMA Negeri di Jawa Tengah
- ❖ Prubahan Sosial dan Kepatuhan Hukum
- ❖ Perencanaan Partisipasi Lokal (Pengalaman Advokasi *Participatory Budgeting* Beberapa LSM/NGO di Yogyakarta)
- ❖ Politik Pembangunan Pedesaan: Kritik atas Diskursus Bank Dunia
- ❖ Kapasitas Tunda Jual dan Konsumsi Petani Padi Studi Kasus di Dua Desa di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah
- ❖ Persepsi Masyarakat Sekaran Tentang Konservasi Lingkungan

Perencanaan Partisipasi Lokal (Pengalaman Advokasi *Participatory Budgeting* Beberapa LSM/NGO di Yogyakarta)

Poerwanti Hadi Pratiwi

Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi,
Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Pelaksanaan pembangunan dikatakan berhasil bila mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi anggota masyarakat. Hal ini dapat terwujud salah satunya dengan mengikutsertakan anggota masyarakat sejak awal proses kegiatan, khususnya dalam penyusunan rencana pembangunan. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan wujudnya bisa berupa kehadiran dalam rapat/musyawarah, pemikiran, dan waktu. Dalam rangka menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat, maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup dilakukan oleh lembaga-lembaga formal dari unsur eksekutif dan legislatif saja. Kelompok-kelompok masyarakat lokal dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/ NGO) dapat turut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran agar lebih dapat dipertanggungjawabkan, atau dengan kata lain lebih sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Pembangunan Partisipatif, *Participatory Budgeting*, LSM/NGO

Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir, banyak kalangan yang menaruh perhatian pada studi tentang partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan; baik itu yang berbasis pada kearifan lokal, pengelolaan bencana, maupun perencanaan dan penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Secara teoritik, tema tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat ditelusur melalui kajian ilmu sosiologi pembangunan¹, maupun sosiologi pemerintahan². Pada prinsipnya, partisipasi masyarakat diupayakan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu memecahkan masalah yang dihadapi dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan

tidak bergantung pada bantuan pihak luar (baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah). Jika pembangunan dilakukan oleh pemerintah guna mensukseskannya, maka masyarakat harus dengan sadar untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya.

Keberadaan ruang partisipasi memiliki arti penting dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD suatu daerah. Melalui ruang ini, pengambil kebijakan diharapkan semakin mengetahui kebutuhan warganya sehingga pos-pos anggaran yang dibentuk tidak meleset dari kebutuhan yang ada. Bantul dan Gunungkidul³ serta beberapa kabupaten/kota lain yang ada di Indonesia pada umumnya; tidak sama dengan Porto